

# PERENCANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN HALTE TRANSMETRO PEKANBARU TAHUN 2021

Oleh: Cindy Afanse

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*Transportation is one of the keys to the development of an area or city. The development and progress in the implementation of transportation needs to be supported by good and quality planning and development and also needs to involve various groups. As in the case that occurred in Pekanbaru City related to the planning for the construction of the Trans Metro Pekanbaru City Bus Stop. Although the operation of the Trans Metro Bus has been running, in the process there are still many people in Pekanbaru who have not used the services of the Pekanbaru Trans Metro Bus as a means of land transportation that can help facilitate traffic activities in Pekanbaru City.*

*The formulation of the problem in this study is how the Pekanbaru City Transportation Service Planning in the Construction of the Pekanbaru Trans Metro Stop in 2020.*

*This study aims to describe the shelter development planning by the Pekanbaru City Transportation Service. In addition, this study uses a qualitative approach and data collection techniques through interviews (interviews) and documentation.*

*The result of this study is that the planning for the construction of shelters in Pekanbaru City carried out by the Pekanbaru City Transportation Service is carried out through a government system for the convenience of the community, in this case the Government has an important role for the construction of a good shelter.*

*The development carried out in general has touched public roads that are easily accessible by the community so that it is easier to access them. It was also found that there were obstacles in the planning for the construction of the bus stop, such as the lack of funds owned by the Pekanbaru City Transportation Service, then the process of determining the location that had problems with the community and poor coordination between stakeholders.*

**Keywords:** *Planning, Department of Transportation, and Trans Metro Bus Stop*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini yaitu permasalahan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat karena sistem transportasi dapat meningkatkan pelayanan penduduk dan sumber daya lainnya sehingga diharapkan dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan disemua bidang kehidupan (Salim, 2012). Modernisasi dalam bidang transportasi merupakan suatu terobosan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan dalam bidang angkutan umum. Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan transportasi, tentu di setiap kota yang sedang berkembang mempunyai angkutan umum, angkutan umum yang sedang gencar-gencarnya yaitu transportasi bus, sebagai sarana pelayanan publik untuk memudahkan para pengguna berpergian. Dengan adanya bus tentu harus ada tempat untuk menunggu bagi para calon penumpang, yaitu halte sebagai tempat untuk menaikan dan menurunkan para penumpang agar lebih dirasa nyaman sebagai akses para pengguna bus.

Halte merupakan salah satu fasilitas transportasi yang disediakan pemerintah sebagai pendukung dalam mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien. Halte diperlukan keberadaannya disepanjang rute angkutan umum dan angkutan umum harus melalui tempat yang telah ditetapkan untuk menaikan dan menurunkan

penumpang agar perpindahan penumpang lebih mudah dan gangguan terhadap lalu lintas dapat diminimalkan. Karena rute inilah keberadaan calon penumpang memberi andil yang cukup besar terhadap gangguan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Penempatan halte disepanjang rute harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, dan digunakan sesuai dengan kegunaannya.

Transportasi merupakan salah satu kunci perkembangan suatu daerah atau Kota. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan, proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi bisa diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Hafis et al., 2014).

Perkembangan dan kemajuan dalam pelaksanaan transportasi tersebut perlu didukung dengan perencanaan dan pembangunan yang baik dan berkualitas pula dan perlu melibatkan berbagai kalangan bukan hanya dari instansi yang telah ditunjuk sebagai pelaksana itu saja namun perlu adanya keterlibatan masyarakat diluar pelaksana kebijakan untuk mengawasi atau memonitoring jalannya perencanaan pembangunan tersebut sehingga ada yang selalu memantau apa yang telah dilaksanakan serta sejauh mana program tersebut dijalankan. Seperti pada kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru terkait dengan perencanaan pembangunan Halte Bus Trans Metro Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah Kota

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2018-2022 yang tertuang dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2017 yang berisikan tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, program lintas dan program kewilayahan. Perencanaan pembangunan dalam konteks pelayanan publik terdapat pada misi ke 3 yaitu *“Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana, jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran Kota”* (RPJMD Kota Pekanbaru).

Sejak pertengahan Juni 2009 Kota Pekanbaru telah memiliki fasilitas angkutan umum dengan mengedepankan paradigma pelayanan angkutan umum yang baru dan berbeda dari sistem sebelumnya. Pemerintah Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, meluncurkan sistem angkutan umum massal berbasis bus, yaitu sistem Bus Rapi Transit dinamakan Trans Metro Pekanbaru untuk memberikan pelayanan angkutan umum bagi warga Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya. Pengelolaan Bus Trans Metro Pekanbaru dialihkan kepada Dinas perhubungan Kota Pekanbaru tepatnya pada tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 46 tahun 2016 tentang

pengoperasian koridor Trans Metro di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Telah habisnya masa kontrak Bus Trans Metro dan PD. Pembangunan Kota Pekanbaru juga sudah beralih bidang properti, pengelolaan kawasan dan utilitas, PD. Pembangunan tersebut juga sudah berubah menjadi PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), yang mengurus segala perubahan administrasi perusahaan. Menurut Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru mengatakan *“Bahwa selama Bus Trans Metro Pekanbaru ini dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Pekanbaru dinilai terus merugi”* ini juga menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota memindah alihkan pengelolaan Bus Trans Metro Pekanbaru ini dari PD. Pembangunan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, tepatnya pada UPTD Dinas Pengelola Angkutan PerKotaan (PAP).

Pertumbuhan kendaraan begitu pesat yakni pada tahun 2019, sehingga pemerintah kota harus memiliki solusi untuk mengendalikan kemacetan dari dampak kendaraan tersebut. Di dalam buku non-fisik Adipura Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa persentase pengguna transportasi umum hanya sekitar 21% terhadap jumlah total kendaraan bermotor, kemudian frekuensi kawasan bebas kendaraan yang hanya 4-6 jam per minggunya. Selanjutnya aktifitas-aktifitas yang berhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Pekanbaru yang salah satunya adalah mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat. Optimalisasi fungsi fasilitas transportasi umum jalan merupakan pelayanan. Apalagi, Pekanbaru telah mendeklarasikan dirinya sebagai Kota metropolitan. Untuk menjawab permasalahan diatas pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bus Trans Metro merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan

pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat yang terdapat pada misi ke 5 RPJMD Kota Pekanbaru yaitu “*Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif*”.

Meskipun pengoperasian Bus Trans Metro telah berjalan, dalam prosesnya masyarakat Pekanbaru masih banyak yang belum menggunakan jasa Bus Trans Metro Pekanbaru sebagai sarana transportasi darat yang dapat membantu memperlancar aktivitas lalu lintas di Kota Pekanbaru. Fenomenanya adalah masyarakat masih lebih memilih angkutan pribadi atau angkutan umum lainnya, yang mana alasan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum lainnya diluar dari Trans Metro Pekanbaru tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru seperti koridor atau tempat pemberhentian yang tidak nyaman. Adapun fasilitas yang disediakan disetiap halte Trans Metro berdasarkan rekap fasilitas koridor halte Trans Metro berdasarkan jumlah serta bentuk halte dan fasilitas halte diantaranya: identitas halte hanya tersedia 58%, rambu petunjuk 46%, papan informasi trayek 7%, lampu penerangan 16%, tempat duduk 58%, tempat sampah 19%, pagar 13% dan papan iklan pengumuman 17% (***Rekapitulasi fasilitas halte oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru***). Sedangkan jumlah koridor atau halte yang statusnya permanen, semi permanen dan portabel

Bahwa masih banyaknya jumlah halte yang memiliki kondisi semi permanen dan portabel. Perbedaan dari ketiga tipe halte ini berdasarkan terdiri segi bangunannya yaitu halte permanen berbentuk kotak dan ditutupi dinding dilengkapi tempat duduk dan tangga

untuk akses naik dan turun penumpang, halte semi permanen bentuknya terbuka tidak ditutupi oleh dinding juga dilengkapi tempat duduk dan tangga untuk akses naik dan turun penumpang, Halte portabel yaitu halte yang hanya menyediakan fasilitas tangga sebagai naik dan turun busway dan halte ini di semi permanenkan secara bertahap.

Halte dibedakan dari bentuknya yakni permanen, semi permanen dan portabel. Adanya halte semi permanen dan portabel dikarenakan penempatan lokasinya tidak memungkinkan untuk dibangun sebuah halte dan juga lokasi daerah yang sempit sehingga tidak ada tempat untuk dibangun halte dan solusinya dibangun lah halte semi permanen dan portabel. Menurut data di atas lebih terlihat bahwa minimnya halte permanen dibanding dengan halte semi permanen dan portabel, padahal seharusnya lebih di perbanyak halte permanen. Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya halte yang belum sepenuhnya mencapai standar kelayakan dari segi infrastruktur dan pelayanannya, karena halte Trans Metro Pekanbaru sangat penting keberadaannya sebagai fasilitas penting dalam akses naik dan turun penumpang pengguna Bus Trans Metro.

Sumber dana pembiayaan pembangunan halte berasal dari tiga sumber yaitu APBN, APBD dan Swasta. Dana dari APBN diberikan kepada Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota terkait dikarenakan Bus Trans Metro Pekanbaru merupakan pemberian Kementrian Perhubungan Pusat untuk dikelola Dinas Perhubungan Kota. Sumber dana APBD, merupakan inisiatif dari pemerintah Kota dan dinas perhubungan untuk menambahkan halte di beberapa lokasi dengan alasan tertentu dan dana diusulkan dari APBD. Sedangkan pembiayaan dana dari swasta merupakan usulan dari pihak swasta kepada pemerintah daerah dengan syarat halte yang

dibangun diberi nama sesuai nama perusahaan pemberi dana pembangunan halte. Halte yang telah ada terdapat beberapa permasalahan halte yang masih belum sepenuhnya layak, yaitu masih adanya beberapa kerusakan serta kurangnya fasilitas halte yang tidak sesuai dengan standar kelayakan halte berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 27 Tahun 2015 (Kurniawan, 2018)

Jika dilihat dari tingkat kepadatan dan seberapa pentingnya keberadaan halte tersebut adalah untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan transportasi umum. Kota Pekanbaru ini menjadi Kota yang metropolitan dan besar yang menjadi basis untuk kepentingan sosial ekonomi perdagangan dan jasa, dan dikembangkan bahwa perlu sarana dan prasarana yang berkualitas untuk angkutan umum. Berikut adalah potret dan berita keadaan halte Bus Trans Metro semi permanen yang ada di Kota Pekanbaru. Selain itu permasalahan dalam pembangunan halte yang tidak merata menjadi salah satu poin dalam pembahasan, peneliti mendapati bahwa tidak samanya tipe halte yang ada di Kota Pekanbaru sesuai rute yang dimiliki oleh Trans Metro Pekanbaru, juga terdapat halte-halte yang tidak layak dan mengalami kerusakan di Pekanbaru.

Maka berdasarkan informasi yang peneliti temukan, peneliti ingin melihat lebih detail tentang perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembangunan koridor trayek Trans Metro Pekanbaru, sehingga peneliti dapat menemukan informasi-informasi seputar perencanaan pemerintahan yang merupakan wujud pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dan dapat pula melihat tingkat objektivitas informasi tersebut secara lengkap dan utuh. Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan masalah, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena yang ditemui di lapangan yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan Pembangunan Halte oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?

## **A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan halte oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan perencanaan pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung-jawab tentang perencanaan pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum.

perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain.

Menurut Siagian (2005:4) mengatakan bahwa pembangunan

adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Dari uraian diatas penulis menyimpulkan pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

### **1. Perencanaan Pembangunan Kota**

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Kota dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membenentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan memebentuk suatu pengertian yang utuh.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu atau negara akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan

reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial.

Tjokrominoto (2010) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai “citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut: (1) pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. (2) pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. (3) pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*). (4) pembagunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *meta-disciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideologi of developmentalism*. (5) pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat. (6) pembangunan menjadi *culture specific, situation specific, dan time specific*.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant Nugroho D, 2006:41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan proritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan ujuan-tujuan rencana.
- b. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
- c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.

- d. Adanya kebijaksanaan yang konsisiten dan serasi, seperti kebijakan fisik, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.
- e. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industry, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
- f. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan di atas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan karena hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsur-unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Menurut Riyadi dan Deddy (dalam Mhd Asrofi, 2005:7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. *Pertama*, Perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan kompreherensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. *Kedua*, proses pembangunan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, efisiensi dan efektifitas dapat dicapai. *Ketiga*,

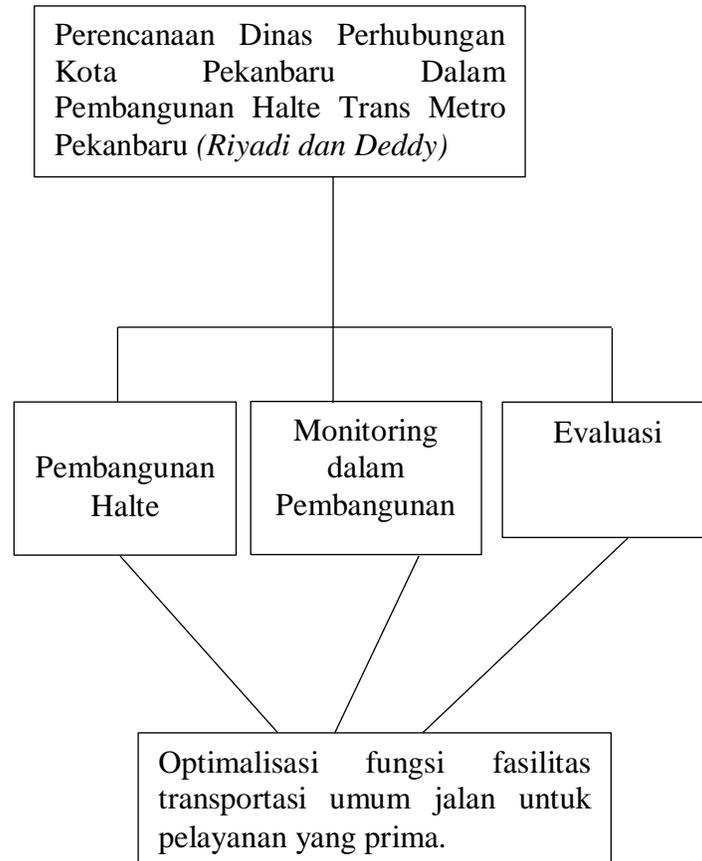
Monitoring sangat dibutuhkan sekali pada tahapan pelaksanaan karena monitoring mampu memberikan gambaran pencapaian sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dan yang *Keempat* yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi manajemen yang saling terkait. Monitoring dalam prekteknnya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

Menurut Siagian dalam Riyadi (2015:263) pengawasan ialah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi didefenisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, dan tujuan pengawasan implementasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk:

- a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- b. Mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- c. Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit atau instansi atau para pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait.

- d. Mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dihindari.

### Kerangka Pemikiran



*Sumber: Data olahan peneliti 2020*

Dari gambar kerangka fikirian ini dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian memakai kerangka pemikiran yang berawal dari judul Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Halte Trans Metro Pekanbaru, yang akan dipisahkan dalam beberapa sub bab

yaitu Perencanaan dalam Pembangunan, Pembangunan Halte, Monitoring Dalam Pembangunan, Evaluasi dalam pembangunan halter tersebut sehingga dari kerangka pemikiran tersebut akan menghasilkan optimalisasi fungsi fasilitas

transportasi umum jalan untuk pelayanan yang prima

### **Definisi Konseptual**

Menurut (Setiawan, n.d., 2017) definisi konseptual adalah abstraksi, yang diungkapkan dalam kata-kata, yang dapat membantu pemahaman. Dalam mengkaji Perencanaan Pembangunan Halte oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka diperlukan sebuah definisi konseptual berupa prosedur yang relevan dengan perencanaan pembangunan. Guna memudahkan penulisan dalam penelitian dan menghilangkan kerancuan definisi tentang beberapa konsep maka perlu dijelaskan beberapa definisi

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini

adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena Kota Pekanbaru sudah mendedikasikan dirinya melalui visi dan misinya yaitu mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat, sesuai dengan permasalahan di atas bahwa perencanaan dinas perhubungan dalam pembangunan koridor trayek Bus Trans Metro di Kota Pekanbaru tergolong masalah yang serius untuk di selesaikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

### **Sumber**

#### **-Informan**

Dalam menentukan informan untuk penelitian ini penulis melakukan dengan cara menggunakan *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2010) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti.

#### **Jenis Data**

- Data Primer
- Data Sekunder

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya dalam penelitian ini digunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu:

Teknik Analisa Data

- Reduksi data,
- Penyajian data,

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pembangunan Halte oleh Dinas Pehubungan**

-Halte Merupakan Bagian dari Sarana Transport

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial demografis wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Di perkotaan, kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena tingkat kelahiran maupun urbanisasi. Tingkat urbanisasi berimplikasi pada semakin padatnya penduduk yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi daya saing dari transportasi wilayah (Susantoro:2004).

Realitas transportasi publik di Pekanbaru sebagai satu bagian dari Kota besar di Indonesia sudah menunjukkan kerumitan persoalan transportasi publik. Kerumitan persoalan itu menyatu dengan variabel pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah kendaraan bermotor yang bertambah melebihi kapasitas jalan, dan perilaku masyarakat yang masih mengabaikan

peraturan berlalu lintas di jalan raya. Kegagalan sistem transportasi mengganggu perkembangan suatu wilayah/kota, mempengaruhi efisiensi ekonomi perKotaan, bahkan kerugian lainnya. Isu -isu ketidak sepadanan misalnya, dapat berakibat pada masalah sosial. (Susantoro:2004)

Untuk membangun sistem transportasi publik berkelanjutan perlu adanya revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik. Pemerintah Kota berperan penting dalam membuat perencanaan dan implementasi kebijakan transportasi publik. Berbagai kebijakan yang mempengaruhi masalah transportasi harus diharmonisasikan, sehingga keduanya dapat berjalan seiring, misalnya, program untuk mendorong penggunaan transit massa dan mengurangi perjalanan dengan mobil berpenumpang satu (*single-occupant car travel*). Hal penting lainnya adalah meningkatkan integrasi transportasi dan perencanaan pemanfaatan lahan. Peningkatan dalam elemen tunggal dan terpisah dari sistem transit atau rencana transportasi, jarang memiliki pengaruh yang kuat. Sedangkan pendekatan sistematis dapat memunculkan energi untuk memperkuat sistem transportasi dan memperbaikinya.

Negara mempunyai peranan penting dalam transportasi publik. Dalam beberapa dekade belakangan ini terlihat dahsyatnya perubahan politik-ekonomi menuju titik minimal peranan negara, dan pada saat yang bersamaan men capai titik maksimal peran pengusaha. Ketika badan publik yang menjadi sandaran pengelolaan kepentingan publik, maka pelayanan kepada publik mau tidak mau

didasarkan pada kemampuan membayar, bukan didasarkan pada penghormatan atas hak-hak warga negara. Perusahaan memberikan pelayanan kepada publik hanya kalau dirinya bisa memperoleh keuntungan, dan perusahaan tidak bisa dituntut bertanggung jawab terhadap nasib warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan publik (Santosa, 2005). Kemandirian negara sebagai tuntutan dan kebutuhan industrialisasi serta pembangunan ekonomi, membutuhkan aliansi-aliansi baru antara negara dan kekuatan-kekuatan sosial politik, sosial ekonomi baik dalam tataran nasional maupun internasional. Negara sebagai kekuatan mandiri menjadi subyek yang memiliki kepentingan-kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan dari kekuatan sosial yang ada di masyarakat (Shin:1989).

Berdasarkan hal tersebut peneliti memiliki temuan di lapangan bahwa halte permanen maupun non permanen yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mencakup hampir semua wilayah di Kota Pekanbaru, sehingga masyarakat cukup terbantu meskipun dalam perencanaan halte belum semuanya baik, tetapi untuk rute yang merupakan bagian dari bus transmetro Pekanbaru telah cukup terpenuhi.

Menurut wawancara kepada Kasubag Tata Usaha Bidang UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan (PAP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyatakan:

*“Ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada efektivitas program dan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Ketersediaan sarana dan prasarana Halte yang ada di*

*Pekanbaru menunjang kegiatan akan pengelolaannya serta pengoperasian bus TMP untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”* (wawancara kepada Bapak Erik selaku Kasubag Tata Usaha Bidang UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan (PAP) Dinas Perhubungan Kota

-Perencanaan dalam Pembangunan Halte di Kota Pekanbaru

Pola perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan berbagai Negara berkembang yang lebih dikenal dengan *top-down strategy* sebagaimana dikemukakan Ndraha (Ndraha:1990) pada awal proses pembangunan memang pola ini membawa manfaat, tetapi tatkala pola itu mengacu pada sistem, muncul masalah. Masyarakat terbiasa untuk bergantung pada pemerintah dan kemampuannya untuk berkembang secara mandiri sukar dikembangkan.

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

“Proses perencanaan halte-halte tersebut yaitu mengikut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, dimana para *stakeholder* melakukan empat tahapan yaitu penyusunan rencana yaitu seperti rencana dimana halte yang dibutuhkan masyarakat, kemudian masuk ke dalam penetapan rencana, kemudian telah ditetapkan halte tersebut maka dalam pembangunannya ada tahapan pengendalian pelaksanaan rencana, dan terakhir evaluasi pelaksanaan rencana, dimana pada tahap akhir tadi akan terlihat bahwa halte tersebut benar-benar berfungsi untuk masyarakat (wawancara kepada

*Bapak Erik selaku Kasubag Tata Usaha Bidang UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan (PAP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”*

Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengawali perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Koridor Trans Metro Pekanbaru (TMP) untuk transportasi publik di Kota Pekanbaru dengan delapan (8) koridor untuk kemudahan masyarakat mengakses transportasi umum.

Perencanaan pembangunan ini lebih lanjut diungkapkan oleh Kepala Bidang UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan (PAP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyatakan:

*“Pemerintah Kota Pekanbaru mempertahankan fungsi dengan cara merawat halte yang ada di Pekanbaru dan meningkatkan kualitas, dan untuk di Pekanbaru sudah ada beberapa halte yg sudah lengkap seperti telah tersedianya untuk kaum disabilitas juga untuk pejalan kaki, kalau sudah adanya halte tentu untuk pejalan kaki sudah tidak ada lagi. Untuk tahun 2019 yg lalu halte mendapatkan bantuan dari kementerian perhubungan 20 halte untuk ditingkatkan dlm kondisi dan dibangun untuk menjadi lebih layak untuk mengakomodir segala kalangan dan kepentingan, dan lebih lanjut lagi dalam perencanaan bukan tidak mungkin akan lebih dikembangkan di wilayah Kota Pekanbaru lainnya mengingat Kota Pekanbaru semakin berkembang dan transportasi umum menjadi salah satu*

*hal yang penting dalam pembangunan wilayah (Wawancara dengan Bapak Sarwono.MT selaku Kepala Bidang UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan (PAP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)”*

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Pekanbaru dalam perencanaan pembangunan halte masih mengalami proses untuk lebih baik kedepannya. Perencanaan pembangunan ini diikuti dengan penetapan standar layanan penyelenggaraan tiket elektronik berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik pada Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru hal itu dapat dilihat dari beberapa gambar berikut yang menjelaskan jenis halte yang ada di jalan protokol Kota Pekanbaru.

Adapun beberapa kondisi halte yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari ratusan unit halte yang telah dibangun di Kota Pekanbaru halte di Kota Pekanbaru rusak dengan kondisi yang memprihatinkan. Hal ini membuat para calon penumpang Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) mengalami kesulitan ketika berada di halte maupun ketika mau menaiki bus dan merasa enggan serta was-was berada di halte tersebut.

Pasalnya, keberadaan halte bus TMP di sejumlah titik, seperti di Jalan Soekarno-Hatta dan juga di Jalan HR Soebrantas serta Jalan SM Amin mengalami rusak parah. Seperti atapnya yang hampir roboh dan juga ditumbuhi semak-semak, bisa dilihat pada gambar dibawah ini bagaimana keadaan halte di Kota Pekanbaru yang rusak dan memprihatinkan:

Selain itu halte yang rusak dan miring juga ditemukan di Jalan Arifin Ahmad, tepatnya depan Jalan Bakti.

Halte tersebut dapat dilihat beberapa tipe dari halte yang ada di koridor-koridor Trans Metro Pekanbaru, penulis menjabarkan halter tersebut dari permanen, seni permanen dan portable.

Dimulai dari Jalan Sudirman memiliki halte permanen berjumlah 20 halte, semi permanen berjumlah 3 dan portabel berjumlah 3 dengan total 26 halte, di Jalan Soekarno Hatta terdapat 3 halte permanen, 24 halte semi permanen dan 12 halte portabel.

Jalan Riau tidak memiliki halte permanen, namun memiliki 6 halte semi permanen dan 11 halte portable, di Jalan Tuanku Tambusai terdapat 8 halte permanen, 6 halte semi permanen dan 10 halte portable, di Jalan Imam Munandar terdapat 10 halte permanen 2 halte semi permanen dan 5 halte portable, di Jalan K.H Nasution terdapat 6 halte permanen, 5 halte semi permanen dan 9 halte portable.

Jalan Arifin Achmad mempunyai 6 Halte permanen, 4 halte semi permanen dan tidak memiliki halte portable, Jalan H.R Soebrantas hanya memiliki 1 Halte Permanen, 20 halte semi permanen dan 5 halte portable, dan terakhir di Jalan Hangtuah tidak memiliki halte permanen, 20 halte semi permanen dan 17 halte portabel, dengan itu berikut keternagan halte beserta jenis haltenya yang didapat melalui data Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Tahun 2021.

Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembangunan halte sudah cukup baik, namun perencanaan tidak sesuai dengan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

-Pelaksanaan dalam Pembangunan Halte di Kota Pekanbaru

Berdasarkan dari kelima jalan protokol yang sebelumnya telah disebutkan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dapat dilihat halte yang terdapat permanen dan portabel atau dapat dipindahkan, hal itu berbeda-beda karena berdasarkan fungsi dan manfaatnya dimasing-masing tempat, seperti yang dijabarkan oleh Unit UKP Dan Perencanaan Program & Kerjasama Bidang UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan (Pap) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

*“Kondisi halte belum memenuhi tetapi dishub akan memberikan kajian dan ketetapan SPM, setelah diaudit jika tidak sesuai SPM dan apa upayanya? dan harus melengkapi SPMnya, harus ada tempat menunggu, trayek, informasi trayek agar masyarakat tau tujuan, kedatangan dan keberangkatan. Dari segi disabilitas harus dijelsin fasilitasnya. Spm terhadap halte harus ditingkatkan supaya pekerjaan adanya harus acuannya.”.* (Wawancara dengan Bapak Suryono.Mt. Selaku Unit UKP Dan Perencanaan Program & Kerjasama Bidang Upt Pengelolaan Angkutan Perkotaan (Pap) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)

Hasil wawancara yang penulis dapati tersebut menandakan bahwa meskipun halte di beberapa

tempat ada yang permanen dan tidak permanen. Tetapi hal tersebut sesuai dengan kebutuhannya, mengingat lokasi-lokasi yang berbeda sehingga dengan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya.

Bangunan halte bus Trans Metro Pekanbaru sebagai tempat penumpang menunggu bus Trans Metro Pekanbaru sudah cukup banyak di Pekanbaru ini. Pada awalnya bangunan halte yang disediakan sangat bagus, bersih, bangunan terbuat dari beton, diberi kaca sehingga keseluruhan halte tertutup dan dapat melindungi penumpang dari hujan, tempat duduk terbuat dari besi yang cukup bagus dan nyaman, dan halte dilengkapi gambar rute bus TMP. Namun, belum lama bus TMP beroperasi halte sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kaca halte pecah, dinding halte dicoret, serta sampah-sampah yang berserakan di halte yang tidak ada petugasnya.

Kepala Bidang UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian sebagai upaya tindakan dan proses agar dapat berhasil mencapai tujuan pengelolaan Infrastruktur Bus Trans Metro Pekanbaru untuk meningkatkan pelayanan transportasi. Menjadikan Trans Metro Pekanbaru sebagai transportasi yang aman, nyaman, handal dan terjangkau sehingga menarik minat penumpang untuk naik Trans Metro Pekanbaru.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Infrastruktur Bus Trans Metro Pekanbaru dan meningkatkan pelayanan Bus Trans Metro sehingga menjadikan Transmetro sebagai transportasi yang paling diminati oleh masyarakat Kota Pekanbaru yakni:

- Teknologi GPS pada Bus Trans Metro
- Kamera CCTV di dalam Bus Trans Metro

- Inovasi Layanan Wifi gratis di dalam Bus Trans Metro

Menurut hasil wawancara yang penulis dapatkan mengenai pelaksanaan dalam pembangunan halte ini dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

*“Pelaksanaan dalam pembangunan halte oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilakukan secara bertahap seperti yang saya sebutkan sebelumnya, juga menerima masukan dari masyarakat bahwa wilayah mana yang paling membutuhkan halte transmetro (Wawancara dengan Bapak Suryono.Mt. Selaku Unit UKP Dan Perencanaan Program & Kerjasama Bidang Upt Pengelolaan Angkutan Perkotaan (Pap) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)”*

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan juga menerima masukan dari masyarakat terkait halte yang akan dibangun, sehingga masyarakat lebih terbantu dengan keberadaan halte tersebut.

- Monitoring dalam Pembangunan Halte di

- Evaluasi dalam Pembangunan Halte di Kota Pekanbaru

- Hambatan-Hambatan dalam Perencanaan Pembangunan Halte

## Kesimpulan

Pembangunan halte di Kota Pekanbaru yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

-Dijalankan melalui sistem pemerintahan untuk kemudahan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah mempunyai peran penting untuk berjalannya pembangunan halte yang baik.

-Pembangunan yang dilaksanakan pada umumnya sudah menyentuh jalan-jalan umum yang mudah untuk diakses oleh masyarakat agar lebih

mudah dalam mengaksesnya. Seperti Jalan Jenderal Sudirman, Tuanku Tambusai, Ahmad Yani, Soekarno-Hatta, dan Jalan Riau yang umumnya menjadi jalur besar yang dilalui oleh masyarakat Kota Pekanbaru untuk beraktifitas.

-Perencanaan pembangunan halte tersebut didapati juga ada hambatan yang terjadi seperti kurangnya dana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, kemudian proses penentuan lokasi yang bermasalah dengan masyarakat dan kordinasi antara *stakeholders* yang tidak baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Andani, D. (2019). Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning Di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 194–202.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Universitas.
- Axnur, V. (2014). *Peranan Dinas Perhubungan dalam Menyampaikan Informasi Rute Trans Metro di Kota Pekan Baru*. Riau University.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik PerKotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171–178.
- Kurniawan, W. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Menggunakan Jasa Transmetro Pekanbaru Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya.
- <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*, terj. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muhammad, F. (2014). *Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik (Studi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2012)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1.
- Nugraha. (2017). *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulsang Bawang Barat*.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2003). *Perencanaan pembangunan daerah: strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, R. N. (2017). *Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Setiawan, U. (n.d.). *Defenisi Konseptual dan Oprasional Koginisi*.

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta.

---